

REFORMASI KURIKULUM DAN KESIAPAN GURU DALAM IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN DASAR: ANALISIS PERBANDINGAN INDONESIA–SINGAPORE

Wiwin Luqna Hunaida¹, Dhuha Hadiyansyah², Zaharil An'asy³, Amelia Khoirunisa⁴

¹Pendidikan Agama Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya

²Bahasa dan Kebudayaan Inggris, Universitas Al-azhar Jakarta

³Pendidikan Bahasa Inggris, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

⁴Pendidikan Agama Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya

wiwinluqna@uinsby.ac.id¹, dhuha.hadiyansyah@uai.ac.id²,
zaharil.anasy@uinjkt.ac.id³, amelianisa1805@gmail.com⁴

ABSTRACT

This study analyses curriculum reform and teacher readiness in the implementation of basic education in Indonesia and Singapore, focusing on factors that influence curriculum development, the characteristics of the Indonesian Merdeka Curriculum and the Singapore National Curriculum, and the challenges faced by teachers in teaching practice. This study uses a qualitative approach based on literature review supplemented by in-depth interviews with primary school teachers from both countries. The findings of this study indicate significant efforts in Indonesia through the Merdeka Curriculum with an emphasis on flexibility, project-based learning, and strengthening the Pancasila Student Profile. However, its implementation still faces obstacles in the form of low teacher readiness, weak supervision, and limited resources. system, and high teacher readiness thanks to comprehensive training and adequate technological infrastructure. In contrast, Singapore has a standardised curriculum, a robust monitoring system, and highly prepared teachers thanks to comprehensive training and adequate technological infrastructure. However, teachers in Singapore face high work demands and rapid changes in education. The comparison shows that the success of curriculum reform is highly dependent on teacher competence, institutional support systems, and a consistent learning ecosystem from the central level to the school level. These findings emphasise the need to strengthen teacher capacity and school management so that curriculum implementation in Indonesia is more effective and sustainable.

Keywords: *teacher readiness, independent curriculum, educational comparison, curriculum reform, singapore national curriculum*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis reformasi kurikulum dan kesiapan guru dalam implementasi pembelajaran dasar di Indonesia dan Singapura, dengan fokus pada faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan kurikulum, karakteristik Kurikulum

Merdeka Indonesia dan Singapore National Curriculum, serta tantangan yang dihadapi guru dalam praktik pembelajaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka yang dilengkapi wawancara mendalam dengan guru sekolah dasar dari kedua negara. Temuan penelitian ini menunjukkan adanya upaya signifikan di Indonesia melalui Kurikulum Merdeka dengan penekanan pada fleksibilitas, pembelajaran berbasis proyek, dan penguatan Profil Pelajar Pancasila. Namun, dalam implementasinya masih menghadapi hambatan berupa rendahnya kesiapan guru, lemahnya pengawasan, dan keterbatasan sumber daya. Sebaliknya, Singapore memiliki kurikulum yang terstandar, sistem pengawasan yang kuat, serta kesiapan guru yang tinggi berkat pelatihan komprehensif dan infrastruktur teknologi yang memadai. Meskipun demikian, guru di Singapore dihadapkan pada tuntutan kerja yang tinggi serta perubahan pendidikan yang cepat. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi kurikulum sangat bergantung pada kompetensi guru, sistem pendukung institusional, dan ekosistem pembelajaran yang konsisten dari pusat hingga sekolah. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan kapasitas guru dan manajemen sekolah agar implementasi kurikulum di Indonesia lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: kesiapan guru, kurikulum merdeka, perbandingan pendidikan, reformasi kurikulum, singapore national curriculum

A. Pendahuluan

Kurikulum tidak dibuat di balik meja lalu disampaikan ke siswa, tetapi para pengambil kebijakan pendidikan mesti menemukannya dengan melakukan riset terhadap kebutuhan peserta didik dan kebutuhan global terhadap produk dari pendidikan. Maka, wajar apabila kurikulum terus diperbarui. Pergantian kurikulum sebagai bagian dari kebijakan kurikulum terjadi di semua negara, termasuk di Indonesia (Mondal & Das, n.d.). Bahkan, dengan mengubah kurikulum pendidikannya, Tiongkok menjadi salah satu negara dengan kekuatan super dalam waktu empat

dekade (Hongbiao, 2013). Merespon situasi Pandemi Covid-19, Kemendikbud Ristek bermaksud memulihkan pembelajaran dengan penerapan Kurikulum Merdeka mulai Februari 2022, dari sebelumnya Kurikulum 2013 atau biasa disingkat K13 (Rahayu et al., 2022).

Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler beragam, dengan memberikan keleluasaan waktu bagi peserta didik untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Sementara itu, guru diberikan keleluasaan untuk memilih perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat

disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Tampak ada harapan bagi optimism terhadap Kurikulum Merdeka. Akan tetapi, Maimunatun Habibah (Habibah, 2022) dalam risetnya menemukan bahwa kompetensi digital guru dan pengaplikasiannya pada proses pembelajaran dalam kerangka Kurikulum Merdeka ternyata masih cukup rendah. Kondisi ini akan menjadi pekerjaan besar karena berpotensi menjadi hambatan implementasi kurikulum baru ini. Senada, Ghufra Hasyim Achmad dkk (Achmad et al., 2022) menemukan bahwa guru agama di tingkat dasar menemui kesulitan dalam memberikan penilaian autentik pada Kurikulum Merdeka.

Pemerintah Indonesia memang terus memerlukan strategi yang tepat untuk mengejar ketertinggalan di bidang pendidikan. Berdasarkan laporan *Programme for International Student Assessment* (PISA) yang dirilis Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), kualitas pendidikan Indonesia memang rendah. Pasalnya, skor kompetensi siswa Indonesia terkait literasi, numerasi, dan sains pada 2018 masih di bawah rata-rata,

bahkan menurun dibandingkan penilaian tiga tahun sebelumnya. Pada 2018, Indonesia memiliki skor membaca sebesar 371 pada 2018, terendah sejak 2003. Skor tersebut pun menempatkan Indonesia di posisi 64 dari 74 negara.

Indonesia juga mencatatkan skor numerasi atau perhitungan matematika sebesar 379. Angkanya menurun dibandingkan pada 2015 yang sebesar 386 dan menempati posisi 73. Skor sains yang dimiliki Indonesia sebesar 396. Angkanya juga menurun dari 2015 yang sebesar 403 dan berada di peringkat 71. Sementara itu, negeri jiran Singapura jauh di puncak dengan menduduki posisi runner up dengan skor 551, hanya kalah oleh Tiongkok dengan skor 590. Singapura, tiga tahun sebelumnya menduduki peringkat teratas dunia. Melihat hasil PISA ini menjadi penting karena perubahan kurikulum di Indonesia dikaitkan dengan skor tersebut (Pratiwi, 2019).

Mencermati fakta di atas, kita perlu melihat negara tetangga yang mutu pendidikannya lebih baik sebagai pembanding. Yang perlu dicermati, salah satu yang utama, adalah kurikulumnya. Penulis memilih Singapura karena reformasi

pendidikan di Singapura telah tumbuh sebagai pendukung kemajuan di bidang ekonomi, pembangunan, politik dan sosial (Efendi Yusuf & His, 2020). Selain itu, pendidikan juga dapat menyatukan beberapa suku dan ras (China, Melayu, dan Tamil) di Singapura—bandingkan dengan Malaysia yang masih berjuang menerima bahasa persatuan mereka (Coluzzi, 2017).

Kurikulum singapura atau yang biasa disebut Singapore National Curriculum (SNC) adalah produk yang didisain oleh Kementerian Pendidikan Singapore (Minister of Education, MoE). Kurikulum ini didesain seragam di seluruh sekolah negeri karena guru akan sangat berpegang pada kurikulum dan fokus pada persiapan siswa untuk lulus ujian. Guru sangat bergantung pada buku teks, lembar kerja, latihan dan praktek. Hanya ada sedikit diskusi di ruang kelas Singapura, dan sekolah sangat menekankan pada penguasaan prosedur tertentu. Kementerian Pendidikan Singapura mengawasi pengembangan kurikulum nasional berdasarkan “Hasil Pendidikan yang Diinginkan”, yaitu keunggulan siswa dalam keterampilan hidup, keterampilan pengetahuan, dan

pengetahuan disiplin mata pelajaran yang dimasukkan ke dalam delapan keterampilan dan nilai inti. Keterampilan dan nilai inti adalah pengembangan karakter; keterampilan manajemen diri; sosial dan kooperatif; melek huruf dan berhitung; berkomunikasi; informasi; berpikir dan kreativitas; dan keterampilan aplikasi pengetahuan. Kurikulum akademik dinilai secara eksternal secara berkala untuk memastikannya dapat dicapai untuk mencapai tujuan dan hasilnya sambil tetap relevan dengan kebutuhan belajar siswa.

Mencermati karakteristik tersebut, Indonesia perlu belajar dari Singapura, yang salah satunya dengan melakukan studi komparasi. Dalam konteks pendidikan, studi ini sering disebut dengan Pendidikan Komparatif yang merupakan studi tentang tata cara atau prosedur membandingkan dua atau lebih sistem yang berbeda, baik antardaerah maupun antarnegara. Noah dan Eckstein (Noah & Eckstein, 1998) menyatakan bahwa Pendidikan Komparatif bermanfaat untuk mengevaluasi keberhasilan dan kekurangan serta mengidentifikasi sesuatu yang bermanfaat atau tidak,

mempertimbangkan isu pendidikan dan mengikuti perkembangan pendidikan secara global untuk menghindari kacamata etnosentrisme sempit, memperoleh pengetahuan tentang model-model sistem pendidikan di berbagai negara dan faktor yang mempengaruhi dan melatar belakangi sistem tersebut, seperti konteks sejarah, sosio-ekonomi, politik, budaya dan fakta-fakta lain yang berpengaruh.

Berdasarkan paparan di atas, permasalahan penelitian yang akan ditemukan jawabannya adalah:

1. Apa faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum sekolah dasar di Indonesia dan Singapura?
2. Apa perbedaan mendasar antara Kurikulum Merdeka Indonesia dan Singapore National Curriculum?
3. Apa saja kendala yang dialami guru dalam implementasi kurikulum tersebut di tiap-tiap negara?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan prosedur yang menghasilkan data deskriptif dalam bahasa tulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Taylor et al., 2015). Penelitian ini bersifat studi pustaka

(*library research*) yang menggunakan referensi utama berupa buku, artikel jurnal maupun laman edukatif yang terkait dengan Kurikulum Merdeka dan Singapore National Curriculum, yang diperkuat dengan wawancara mendalam dengan guru SD di kedua negara sampai informasi yang didapat jenuh dan dianggap memadai. Wawancara sendiri dilakukan melalui tatap muka terhadap informan dari Indonesia dan dan via media sosial Zoom Meeting terhadap informan dari Singapura. Penelitian kepustakaan relevan untuk penelitian ini karena dapat memecahkan masalah yang tertumpu pada penelaahan secara kritis dan mendalam (Danandjaja, 2014).

Sementara itu, pengumpulan informasi dilakukan dengan cara: *pertama*, mencari dan mengumpulkan informasi terkait masalah penelitian; *kedua*, analisis data dengan metode analisis isi (Ahmad, 2018). Metode penelitian dilakukan dengan cara mengidentifikasi informasi secara objektif dan sistematis. Setelah terkumpul, data-data tersebut dianalisis menggunakan pendekatan deksriptif-analitik. Pendekatan tersebut dilakukan dalam tiga tahap yaitu: *pertama*, analisis kritis terhadap

relevansi informasi atau data yang dikumpulkan dengan topik penelitian; *kedua*, interpretasi kritis terhadap data yang terkumpul serta dideskripsikan guna mengantarkan kepada konklusi terhadap rumusan masalah; *ketiga*, penarikan simpulan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Perkembangan Kurikulum Sekolah Dasar di Indonesia

Kurikulum di Indonesia sejak merdeka tahun 1945 telah mengalami 13 kali perkembangan atau perubahan kurikulum, yaitu: Kurikulum 1947, Kurikulum 1952, Kurikulum 1964, Kurikulum 1968, Kurikulum 1973 (Proyek Perintis Sekolah Pembangunan), Kurikulum 1975, Kurikulum 1984, Kurikulum 1994, Kurikulum 1997 (revisi kurikulum 1994), Kurikulum 2004 (Kurikulum Berbasis Kompetensi, KBK), 2006 (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, KTSP), Kurikulum 2013 (K13), dan terakhir Kurikulum Merdeka pada 2022 (Insani, 2019). Perubahan ini berdasarkan orientasi, desain, dan model pendidikan dengan tujuan utama untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan nasional serta mensejajarkan dengan pendidikan-

pendidikan yang ada di dunia (Alhamuddin, 2014).

Selama era Reformasi, pemerintah Indonesia telah melakukan empat kali perubahan kurikulum. Setahun pascakejatuhan Soeharto, pemerintah menghadirkan Suplemen Kurikulum 1999. Akan tetapi, perubahannya lebih pada menambal sejumlah materi pelajaran saja. Perubahan yang cukup signifikan terjadi pada 2004. Pada 2004 kurikulum di Indonesia kembali berganti menjadi KBK (kurikulum berbasis kompetensi), yang menitikberatkan pada kompetensi tiga unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai spesifikasi, indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran bagi peserta didik dan tenaga pengajar. Dengan kurikulum itu, sekolah diberi kewenangan menyusun dan mengembangkan komponen kurikulum sesuai dengan kondisi sekolah dan kebutuhan peserta didik dari yang mulanya berbasis materi menjadi kompetensi. KBK mempunyai ciri-ciri yang menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal,

berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Lalu kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan metode bervariasi. Pada kurikulum ini peserta didik diharapkan mencari sumber pembelajaran lain yang memenuhi unsur edukasi dan tidak terlalu terpaku kepada guru sebagai sumber belajar. Pada kurikulum 2004, pemerintah kembali mengubah nama SLTP menjadi SMP dan SMU kembali lagi menjadi SMA (Wirianto, 2014).

Merespons Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No 10 tahun 2003, pemerintah membuat Kurikulum 2006 dengan nama KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). Meski kurikulum itu hampir sama dengan KBK 2004, tetapi prinsip penyusunannya menggunakan konsep desentralisasi pada sistem pendidikan. Pemerintah hanya menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, lalu guru diminta mengembangkan silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan peserta didik di daerah masing-masing.

Pada 2013, pemerintah memutuskan mengganti KTSP dengan kurikulum baru. Kurikulum 2013 (K13) memiliki empat aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan perilaku. Di dalam K13, terutama di dalam materi pembelajaran terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Akan tetapi, penerapan K-13 dihentikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan melalui Peraturan Menteri nomor 60/2014 tanggal 11 Desember 2014. Alhasil kurikulum yang digunakan kembali kepada KTSP, kecuali bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang sudah melaksanakannya selama 3 (tiga) semester, satuan pendidikan usia dini, dan satuan pendidikan khusus. Penghentian tersebut bersifat sementara, paling lama sampai tahun pelajaran 2019/2020.

Pada 2020, Indonesia dihadapkan pada Pandemi Covid-19 yang juga memukul pendidikan karena harus diselenggarakan secara daring atau tatap muka terbatas. Pada masa ini, pemerintah membuat dua pilihan untuk sekolah, yaitu Kurikulum 2013 secara penuh atau menggunakan Kurikulum Darurat.

Pada 2021, pemerintah membuat Kurikulum Prototipe yang sedianya akan menjadi opsi ketiga pada 2022 hingga 2024. Akan tetapi, yang muncul kemudian, pada 2022 adalah Kurikulum Merdeka.

Dalam Kurikulum Merdeka, mata pelajaran IPA dan IPS digabungkan menjadi mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS), dengan harapan dapat memicu anak untuk dapat mengelola lingkungan alam dan sosial dalam satu kesatuan. Selain itu, terdapat Pembelajaran Berbasis Proyek untuk penguatan Profil Pelajar Pancasila yang dilakukan minimal 2 kali dalam satu tahun ajaran.

Penerapan Kurikulum Merdeka juga didukung oleh aplikasi khusus yang menyediakan berbagai referensi bagi guru untuk terus mengembangkan praktik mengajar secara mandiri dan berbagi praktik. Pemerintah meyakini bahwa Kurikulum Merdeka memiliki sejumlah keunggulan, antara lain: 1) Lebih sederhana dan mendalam Fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Belajar jadi lebih mendalam, bermakna dan menyenangkan; 2). Lebih merdeka

dalam arti peserta didik dapat memilih mata pelajaran sesuai dengan minat, guru mengajar sesuai dengan tahap capaian dan perkembangan peserta didik, dan sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik; 3. Lebih relevan dan interaktif, karena kurikulum ini memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi Profil Pelajar Pancasila terutama pada pembelajaran melalui kegiatan proyek.

2. Perkembangan Kurikulum Sekolah Dasar di Singapura

Sekolah di Singapura dimulai ketika colonial Inggris menguasai wilayah yang dulu disebut Temasik (1819–1959). Inggris memberlakukan sistem sekolah yang dibedakan menurut media pengajaran (Inggris, Cina, Melayu, dan Tamil), dan dalam setiap bagian, kurikulum, materi kurikulum, dan penilaiannya berbeda. Akan tetapi, setelah merdeka, pemerintah Singapura berupaya melakukan standardisasi kurikulum

nasional, yang puncaknya adalah pada pertengahan 1980an (J. Tan & Gopinathan, 2000); Lim & Gopinathan, 1990).

Pembaruan kurikulum tersebut adalah respons terhadap pertumbuhan ekonomi global yang membutuhkan peningkatan sumber daya manusia guna menumbuhkan daya saing ekonomi. Kondisi ini ditangani serius oleh pemerintah Singapura menyusul resesi ekonomi global pada 1985-86. Kementerian Perdagangan & Komite Ekonomi Perindustrian merekomendasikan pendidikan yang memaksimalkan potensi individu, kreativitas, dan keterampilan untuk memperkuat daya saing global. Sejak itu, Singapura memiliki kurikulum nasional yang diawasi oleh Curriculum Development Institute of Singapore (J. Tan & Gopinathan, 2000). Tahun 1980an menjadi titik tolak kebangkitan pendidikan di Singapura karena didukung kekuatan ekonomi yang melesit. Kondisi ini membuat sistem pendidikan Singapura berubah dari kuantitas ke kualitas.

Selanjutnya, pada tahun 1997, sistem pendidikan di Singapura mulai berubah menjadi “Berbasis Kemampuan” setelah Perdana

Menteri Goh Chok Tong merumuskan visi pendidikan sebagai tempat belajar bangsa. Kebijakan ini menekankan pada pendidikan nasional, berpikir kreatif, pembelajaran kolaboratif, dan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Sekolah menjadi lebih beragam dan diberi otonomi yang lebih bebas dalam menentukan kurikulum dan potensi akademiknya sendiri di tiap daerah. Kementerian Pendidikan secara resmi menyatakan bahwa “kesempurnaan” tidak hanya diukur dari segi akademis (Gopinathan & Mardiana, 2013).

Pada 2011 pemerintah Singapore mencanangkan kurikulum kompetensi abad 21 untuk sekolah dasar yang diklasifikasikan menjadi tiga kelompok kemampuan fundamental, yang terdiri atas Matematika & Sains, Bahasa dan Humaniora & Seni, Pengetahuan Keterampilan dan Kemampuan hidup (Kim et al., 2013). Semua anak memulai pendidikan sekolah dasar pada usia 7 tahun. Pendidikan dasar enam tahun wajib bagi setiap warga negara untuk memberi mereka landasan pendidikan yang kuat: mengembangkan keterampilan bahasa dan berhitung, membangun karakter dan memelihara nilai-nilai

yang baik dan kebiasaan yang baik. Di akhir Sekolah Dasar kelas 6, siswa mengikuti Ujian Kelulusan Sekolah Dasar (PSLE, Primary School Leaving Examination), yang menilai kelayakan mereka untuk melanjutkan ke pendidikan menengah yang mengandalkan kecepatan belajar, kemampuan, dan kecenderungan mereka. Siswa juga dapat mendaftar ke sekolah menengah berdasarkan kemampuan dan minat mereka yang beragam di berbagai bidang seperti seni dan olahraga melalui ujian Penerimaan Sekolah Langsung atau *Direct School Admission* (Efendi Yusuf & His, 2020).

3. Perbedaan Kurikulum Merdeka Indonesia dan Singapore National Curriculum

Secara kognitif (membaca, matematika dan sains), saat ini Indonesia masih jauh ketinggalan di bawah Singapura. Tak heran jika sejumlah sekolah yang berafiliasi dengan Singapura/kurikulum Singapura menjadi daya tarik yang kuat di sejumlah kota besar di Indonesia. Sekolah-sekolah tersebut misalnya Singapore School, Singapore Intercultural School, Raffles Christian School, Anglo Chinese School (ACS), atau Cahaya

Singapore Montessori School. Bandingkan dengan Sekolah Indonesia Singapura (SIS) yang merupakan satu satunya sekolah milik/terafiliasi dengan Indonesia di Singapura sejak 1967. Jika siswa di sekolah sekolah-sekolah Singapura yang ada di Indonesia adalah ekspatriat dan WNI kelas menengah-atas, murid SIS didominasi buruh migran Indonesia (Helmy, 2020).

Kesuksesan tersebut tentu saja salah satunya didukung oleh kurikulum yang kuat. Jika kita cermati, kurikulum pendidikan dasar di Singapura memiliki ciri sebagai berikut:

a) Sekolah Dasar/Primary 6 tahun: 4 tahun pendidikan dasar dan 2 tahun masa orientasi dan pendidikan karakter (karakter umum dan karakter pendidikan). Di tahun pertama, pendidikan karakter fokus pada perhatian (*caring*) dan penghormata (*respect*) kepada diri dan orang lain; di tahun kedua fokus pada 7 kebiasaan (proaktif, terencana, skala prioritas, solusi *win-win*, mengerti sebelum ingin dimengerti, kerjasama, dan hidup seimbang). Meskipun TK tidak menjadi syarat masuk SD di Singapura, melihat ketatnya

kurikulum di tingkat dasar ini, ada dorongan besar bagi orang tua di Singapura untuk tidak melewatkan TK (Choy dan Karuppiyah, 2016). Presentasi anak usia 5-6 tahun mengikuti PAUD sebesar 90%.

- b) Pendidikan merupakan prioritas dalam pembangunan ekonomi.
- c) Fokus pada pengajaran mata pelajaran tertentu, keterampilan memecahkan masalah, mendorong kerja, proyek dan pemikiran kreatif. Tujuan dari kurikulum ini adalah membekali siswa pengetahuan dan keterampilan praktis untuk menghadapi persoalan hidup, terutama ekonomi/kerja (Efendi Yusuf & His, 2020).
- d) Jalur pembelajaran yang dibedakan. Sistem ini dirancang untuk mempromosikan berbagai kemampuan belajar untuk mendorong setiap siswa mencapai yang terbaik dengan kecepatannya sendiri (Zguir et al., 2021).

Di samping itu, yang menonjol dari pendidikan di Singapura dalam menunjang implementasi kurikulum adalah sistem pengawasan sekolah yang ketat dan akuntabel (O. S. Tan & Chua, 2022). Seleksi guru juga sangat ketat. Negara menargetkan guru dari 5% lulusan teratas yang

harus menjalani pelatihan di Institut Pendidikan Nasional (NIE). Singapura melakukan investasi yang besar dalam meningkatkan mutu guru dan menarik minat lulusan terbaik untuk menjadi guru (Sclafani, 2015).

Sementara itu, Kurikulum Merdeka memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Pendidikan dasar 6 tahun. Ijazah TK/PAUD tidak menjadi syarat masuk SD. Berbeda jauh dari Singapura, partisipasi anak Indonesia di PAUD (usia 5-6 tahun) sebagai pembangun kesiapan memasuki pendidikan dasar hanya berkisar 13,47% di pedesaan dan 18,77 di perkotaan (data dari Kemenpppa, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).
- 2) Pembelajaran berbasis proyek bertujuan mengembangkan soft skill serta karakter sesuai profil pelajar Pancasila.
- 3) Fokus pada materi esensial, sehingga ada waktu untuk pembelajaran mendalam untuk kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi.
- 4) Fleksibilitas guru untuk melakukan pembelajaran yang berdasarkan kemampuan peserta didik.

Dari sisi kurikulum secara umum, pada dasarnya Kurikulum Merdeka juga menghendaki pendidikan yang sesuai dengan minat siswa dan signifikansi supaya hasil belajar bermanfaat secara praksis dalam kehidupan, sebagaimana Singapore National Curriculum. Bahkan, Kurikulum Merdeka tampak lebih humanis dengan memasukkan karakter bangsa yang bhinneka ini. Akan tetapi, ada perbedaan menonjol pada sistem pengawasan dan akuntabilitas sekolah serta sistem perekrutan dan pengembangan kualitas guru.

Pengawasan dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan di sekolah di Indonesia tergolong lemah (Safitri, 2022). Sementara itu, data Unesco dalam Global Education Monitoring Report 2016 menunjukkan bahwa kualitas guru di Indonesia memang mengenaskan, yakni berada di peringkat ke 14 dari 14 negara berkembang yang disurvei (Hoesny & Darmayanti, 2021). Kedua permasalahan ini tampaknya akan menjadi sandungan dalam implementasi Kurikulum Merdeka di masa mendatang jika tidak segera ditangani oleh pemerintah.

4. Kendala yang dialami guru dalam implementasi kurikulum

Penerapan kurikulum yang baru meniscayakan adanya penyesuaian bagi guru. Menurut informan (33), seorang guru SD di Surabaya, mengatakan bahwa ada sejumlah tantangan dalam penerapan Kurikulum Merdeka di sekolah:

1) Butuh Waktu untuk Penyesuaian

Sekolah tempat informan mengajar merupakan salah satu dari lembaga yang menjadi pilot project penerapan kurikulum Mendikbudristek. Dirinya sudah beberapa kali mengikuti pelatihan. Proses pembelajaran yang lebih pada terapan diakuinya akan membutuhkan adaptasi, karena selama ini di kelas guru biasanya banyak memberikan teori. Informan mengakui keunggulan Kurikulum Merdeka yang mendorong siswa lebih banyak berinteraksi di sekolah dengan menitikberatkan implementasi pembelajaran yang sudah dikuasai siswa dan guru.

“Di sini, kami sebagai guru harus bersiap-siap dengan lebih banyak membimbing untuk praktik,” katanya.

Pada tahap awal seperti ini, ketika guru harus beradaptasi, dia juga harus memastikan siswa tidak

kebingungan dengan perubahan yang drastis ini.

“Di samping itu, kami juga harus memahami orang tua. Padahal, aslinya saya sebagai guru juga agak ragu-ragu apakah cara yang saya lakukan sudah sesuai dengan aturan di kurikulum baru ini,” jelasnya.

Selain itu, yang perlu diadaptasi adalah menyiapkan administrasi pembelajaran sesuai dengan buku pedoman dan bagaimana menerapkan pendidikan yang berpusat pada kebutuhan siswa. Pekerjaan baru ini memakan waktu lebih lama. Padahal, Kurikulum Merdeka belum diterapkan di seluruh kelas, baru di kelas 5 dan 6.

2) Menyiapkan Rancangan Pembelajaran yang Menarik

Bagi informan, mengeksekusi kurikulum bentuk RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) menantang. Rancangan pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka memuat empat aspek: pengumpulan data karakteristik satuan pendidikan, penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan yang digunakan di tiap tiap satuan pendidikan, penyusunan modul ajar, dan penyusunan modul proyek penguatan profil pancasila. Guru sebagai

eksekutor, perlu membuat pembelajaran menjadi menarik.

“Kami berpikir keras, bagaimana membuat pembelajaran yang menarik tersebut. Dalam pelatihan, terus terang, kami kurang diberikan contoh-contoh konkret. Kami tahu bahwa memang pelajaran itu harus menarik, tetapi di lapangan, terkadang kami juga buntu bagaimana harus melakukannya,” terangnya.

Di sisi lain, guru diberikan keleluasaan untuk memilih perangkat ajar yang sesuai dengan minat siswa. Akan tetapi, peminatan yang beragam akan memberikan tantangan baru bagi guru, karena sebelumnya hanya menyediakan satu perangkat ajar.

“Bagaimana lagi, kita kan harus siap dengan segala perubahan,” katanya.

Sementara itu, berdasarkan keterangan informan, seorang guru SD di Singapura yang sudah 35 tahun mengajar, sistem pendidikan di Singapura secara umum sangat bagus. Setiap guru memiliki satu komputer pribadi di sekolah, yang didalamnya sudah tersedia semua yang dibutuhkan untuk proses belajar-mengajar. Jadi, dalam alur informasi dari pusat hingga ke sekolah nyaris tidak ada kendala berarti.

Dari sisi siswa juga demikian, setiap sekolah negeri di Singapura tersedia tablet dari Apple atau iPad dalam jumlah yang sangat cukup untuk digunakan siswa ketika membutuhkan pelajaran berbasis daring. Didalamnya ada banyak aplikasi pendidikan yang bisa digunakan sewaktu-waktu jika guru merasa hal itu dibutuhkan.

Namun demikian, guru secara pribadi memiliki sejumlah tantangan yang menurut informan tak dapat dikatakan ringan, yaitu:

1) Jam kerja

Jam belajar untuk SD di Singapura adalah dari pukul 07.30-13.30 dari Senin sampai Jumat. Akan tetapi, siswa harus datang paling telat jam 07.20 supaya pelajaran bisa dimulai tepat waktu. Dengan demikian, guru harus datang lebih awal daripada murid. Sistem kerja di Singapura menuntut sesuatu berjalan cepat dan tepat waktu. Selain itu, guru di Singapura juga tak sekadar mengajar kelas reguler. Informan, misalnya, meskipun tugas utamanya adalah mengajar Bahasa Inggris, dia juga memegang kelas *Learning Support Program* (program dukungan belajar) bagi murid yang kurang secara akademik. Meskipun

menerapkan pendidikan inklusif dan siswa dengan kemampuan berbeda (*diverse learner ability*), sekolah di Singapura tetap membuat kategori berdasarkan aspek kognisi untuk diberikan perlakuan khusus: *high progress people* (HP), *midlle progress people* (MP), dan *low progress people* (LP). Mereka yang masuk kategori LP akan diikutkan kelas bimbingan khusus. Kelas khusus ini masih di dalam rentang jam belajar tadi.

Memberikan penilaian juga membutuhkan banyak waktu bagi guru. Sistem pendidikan dasar di Singapura membedakan penilaian bagi siswa. Untuk sekolah dasar kelas 1 dan 2, guru memberikan penilaian sumatif, sedangkan untuk kelas 3 ke atas guru memberikan penilaian formatif. Meskipun tampak kerja setengah hari, guru sejatinya juga harus bekerja keras untuk menyeimbangkan antara bekerja dan mengurus keluarga karena ada banyak hal yang mesti dipersiapkan di luar jam mengajar. Saat liburan akhir semester misalnya, guru malah sangat sibuk karena ada banyak urusan untuk evaluasi.

Untuk memastikan guru benar-benar memiliki liburan, MOE membuat kebijakan *protected vacation time*, di

mana guru harus benar-benar diberikan waktu untuk liburan selama minimal dua minggu pada liburan panjang di bulan Juni. Selebihnya, guru mendapatkan hari libur mengajar sebagaimana masa liburan siswa tetapi dalam masa *unprotected time*, di mana guru dilarang ke luar negeri, dan sering masih harus ke sekolah untuk rapat dan melakukan pekerjaan administrasi yang lain.

“Kalau di sekolah saya, satu minggu pertama di masa liburan panjang bulan Juni guru harus hadir seperti biasa, dan seminggu sebelum masuk sekolah, guru harus sudah berada di Singapura untuk sewaktu-waktu ada panggilan. Jadi, kami punya waktu benar-benar bebas selama dua minggu,” jelasnya.

2) Harapan Orang Tua dan Kepala Sekolah

Orang tua di Singapura memiliki harapan yang sangat besar pada pendidikan. Mereka juga sangat percaya kepada guru. Untuk menjembatani komunikasi antara guru dan orang tua, setiap sekolah punya departemen kedisiplinan (*Discipline Department*). Jika ada keluhan, orang tua tidak langsung menyampaikannya ke guru, tetapi ke sesi ini. Akan tetapi,

jika terkait anak-anak, orang tua sering langsung menghubungi guru.

Di SD Singapura, setiap siswa memiliki akun email pribadi. Karena siswa masih kecil, orang tua juga pasti mengetahui akun anak-anak mereka untuk melihat laporan perkembangan atau informasi resmi dari sekolah. Sistem ini cukup membantu dalam komunikasi, akan tetapi secara emosional guru sering terbebani antara harapan orang tua yang sangat besar, sedangkan kemampuan sang anak memang berbeda dari harapan. Terkadang orang tua merasa guru kurang menekan anaknya supaya maju, tetapi guru melihat potensi yang dimiliki anak memang tak sesuai dengan permintaan orang tua.

“Karena pendidikan kami inklusif, terkadang ada anak yang kami lihat memiliki ciri-ciri disabilitas seperti disleksia atau ADHD (*Attention-deficit hyperactivity disorder*). Ketika kami berikan saran supaya diperiksa ke ahli, mereka menyangkalnya,” ujar informan.

Selain orang tua, kepala sekolah juga memiliki harapan yang sangat tinggi untuk performa guru-guru di kelas. Sekolah di Singapura memiliki sistem observasi peajaran (*Lesson Observation*). Di sini kepala sekolah

akan memeriksa proses pembelajaran yang dilakukan guru di kelas. Dalam setahun proses ini dilakukan dua kali, dan menyiapkannya membutuhkan waktu serta kerja keras. Kepala sekolah akan memeriksa rencana pembelajaran hingga berbagai aktivitas di kelas. Guru akan melaporkan ke dalam sistem, dan kemudian akan mendapatkan nilai.

Singapura memiliki sistem ranking untuk guru *substantive grade*. Yang melakukan ini adalah kepala departemen dan kepala sekolah. Semua guru mengejar nilai yang tinggi karena akan mendapatkan insentif berupa uang untuk guru dengan skor tertentu yang biasa disebut *performance bonus*.

3) Anak Berkebutuhan Khusus

Pendidikan inklusi memang membuat anak-anak berkebutuhan khusus mendapatkan tempat di dunia pendidikan dan tidak lagi tersisihkan. Pendidikan inklusi juga mengajarkan anak-anak untuk memahami dan menghormati mereka yang hidup dengan disabilitas (Rasmitadila, dkk 2022). Akan tetapi, di kelas, tugas guru menjadi lebih berat karena menghadapi anak berkebutuhan khusus memerlukan fokus dan keahlian khusus.

4) Perubahan yang Cepat

Dikatakan informan, antara tahun 1984 sampai 1990an, perubahan sistem pendidikan dirasakannya tak sedrastis sekarang. Dia mengaku respons pendidikan terhadap perubahan mengalami percepatan sejak era internet di tahun 2000an, meskipun pemerintah Singapura sudah menggunakan internet di tahun awal era 90an. Perubahan yang drastis tersebut puncaknya saat Pandemi Covid-19 pada tahun 2019, yaitu ketika media belajar benar-benar berubah total. Sebagai guru yang sudah berusia 60 tahun, dia mengaku harus belajar ekstra keras menghadapi berbagai teknologi. Namun, menurutnya, tugas guru harus terus belajar, tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk memberikan teladan bagi siswa.

D. Kesimpulan

Secara umum tiap-tiap negara memiliki karakteristik dan tantangan masing-masing. Kedua kurikulum yang dibahas tidak perlu dipertentangkan untuk diadu mana yang lebih baik, karena ada terlalu banyak variabel yang perlu dibuat supaya perbandingan bisa kompatibel atau *apple to apple*. Yang justru perlu

dicermati adalah bagaimana mengambil kebijaksanaan dari kurikulum di dua negara untuk diteladani. Misalnya, pendidikan karakter Singapura yang berorientasi nilai-nilai global yang cocok bagi dunia usaha, sedangkan pendidikan karakter Indonesia yang disesuaikan dengan dasar negara, yaitu Pancasila. Keduanya memiliki kekuatan masing-masing yang khas.

Bagi Indonesia khususnya, Kurikulum Merdeka memberikan harapan baru bagi peningkatan kualitas pendidikan terutama dari sisi kognisi dan penguatan karakter siswa. Jika dilihat dari hasil penelitian, tantangan yang ada pada guru dalam implementasi kurikulum perlu dilihat sebagai peluang untuk memperbaiki manajemen. Di sini, Indonesia perlu belajar dari Singapura yang sistemnya sudah terintegrasi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, G. H., Ratnasari, D., Amin, A., Yuliani, E., & Liandara, N. (2022). Penilaian Autentik pada Kurikulum Merdeka Belajar dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(4), 5685–5699.
- Ahmad, J. (2018). Desain penelitian analisis isi (Content analysis). *Research Gate*, 5(9), 1–20.
- Alhamuddin, A. (2014). Sejarah Kurikulum di Indonesia (Studi Analisis Kebijakan Pengembangan Kurikulum). *Nur El-Islam*, 1(2), 48–58.
- Coluzzi, P. (2017). Language planning for Malay in Malaysia: A case of failure or success? *International Journal of the Sociology of Language*, 2017(244), 17–38.
- Danandjaja, J. (2014). Metode penelitian kepustakaan. *Antropologi Indonesia*.
- Efendi Yusuf, M., & His, L. N. (2020). The Comparison of Curriculum in Elementary Education between Indonesia and Singapore. *Journal of Teaching and Learning in Elementary Education (JTLEE)*, 3(2), 22–36.
- Gopinathan, S., & Mardiana, A. B. (2013). Globalization, the state and curriculum reform. In *Globalization and the Singapore curriculum* (pp. 15–32). Springer.
- Habibah, M. (2022). Pengembangan Kompetensi Digital Guru Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar Dalam Kerangka Kurikulum Merdeka. *Sittah: Journal of Primary Education*, 3(1), 76–89.
- Helmy, M. I. (2020). *SISTEM DAN MODEL PEMBELAJARAN DI SEKOLAH INDONESIA SINGAPURA (SIS) SINGAPURA*. IAIN SALATIGA.
- Hoesny, M. U., & Darmayanti, R. (2021). Permasalahan dan Solusi Untuk Meningkatkan Kompetensi

- dan Kualitas Guru: Sebuah Kajian Pustaka. *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 11(2), 123–132.
- Hongbiao, Y. (2013). Implementing the national curriculum reform in China: A review of the decade. *Frontiers of Education in China*, 8(3), 331–359.
- Insani, F. D. (2019). Sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 8(1), 43–64.
- Kim, M., Tan, A. L., & Talaue, F. T. (2013). New vision and challenges in inquiry-based curriculum change in Singapore. *International Journal of Science Education*, 35(2), 289–311.
- Mondal, N., & Das, A. C. (n.d.). OVERVIEW OF CURRICULUM CHANGE: A BRIEF. *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)*, 260.
- Noah, H. J., & Eckstein, M. A. (1998). *Doing comparative education: Three decades of collaboration* (Vol. 5). Hong Kong University Press.
- Pratiwi, I. (2019). Efek program PISA terhadap kurikulum di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 4(1), 51–71.
- Rahayu, R., Rosita, R., Rahayuningsih, Y. S., Hernawan, A. H., & Prihantini, P. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Penggerak. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 6313–6319.
- Safitri, H. D. A. (2022). Kinerja pengawas sekolah yayasan pada jenjang pendidikan menengah pertama: perspektif guru dan kepala sekolah. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 10(2).
- Sclafani, S. K. (2015). Singapore chooses teachers carefully. *Phi Delta Kappan*, 97(3), 8–13.
- Tan, J., & Gopinathan, S. (2000). *Education reform in Singapore: Towards greater creativity and innovation?*
- Tan, O. S., & Chua, J. J. E. (2022). Science, social responsibility, and education: The experience of singapore during the COVID-19 pandemic. In *Primary and secondary education during Covid-19* (pp. 263–281). Springer, Cham.
- Taylor, S. J., Bogdan, R., & DeVault, M. (2015). *Introduction to qualitative research methods: A guidebook and resource*. John Wiley & Sons.
- Wirianto, D. (2014). Perspektif historis transformasi kurikulum di Indonesia. *Islamic Studies Journal*, 2(1).
- Zguir, M. F., Dubis, S., & Koç, M. (2021). Embedding Education for Sustainable Development (ESD) and SDGs values in curriculum: A comparative review on Qatar, Singapore and New Zealand. *Journal of Cleaner Production*, 319, 128534.